



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA KERJA 2018



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2018 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen rencana kerja dalam periode 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran yang disusun dengan memedomani Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 sampai dengan periode Triwulan II yang telah dilaksanakan.

Namun demikian, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 ini juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebagai wujud dukungan dan komitmen Inspektorat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai alat bantu "*tools*" dalam rangka menyelaraskan program/kegiatan di Inspektorat dengan visi misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih Tahun 2017 – 2022.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Tahun 2018 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jumlah dana yang telah dialokasikan sehingga akan mencapai target program/kegiatan dan kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Pangkalpinang, September 2017

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196307171989031009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kemudahan serta limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana amanat RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana kerja Tahun 2018 ini dibuat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap visi misi dan program prioritas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017 – 2022, sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Pada akhirnya Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memprioritaskan program pembangunan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah dan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai. Kiranya Allah SWT meridhoi segala upaya dan niat baik yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai amal ibadah untuk kita sekalian. Amin Ya Rabbal Alamin.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196307171989031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
1.1.	Latar Belakang..... 1
1.2.	Landasan Hukum..... 3
1.3.	Maksud dan Tujuan..... 6
1.4.	Sistematika Penulisan..... 7
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 10
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016) dan Renstra Perangkat Daerah..... 10
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 25
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017..... 26
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 35
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 35
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 35
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 37
BAB V	PENUTUP..... 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perencanaan Renstra Perangkat Daerah samapai dengan Triwulan II Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	12
Tabel 2.2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	21
Tabel 2.4.1.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	28
Tabel 3.2.1.	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Insektorat 2017-2022.....	36
Tabel 3.3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

*P*ercepatan dan pelaksanaan program (prioritas) pembangunan daerah disasar dan dikembangkan dengan berbagai metode untuk mensejahterakan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan kebijakan, pengelolaan program hingga pelaksanaan kegiatan. Meski demikian sejumlah kendala masih dihadapi pemerintah daerah, tak terkecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di satu sisi pemerintahan daerah yang baru terbentuk berusaha meningkatkan tren pembangunan program prioritas di awal masa pemerintahan pertama di samping mencari alternatif sumber-sumber penerimaan daerah untuk menjalankan kontinuitas program pembangunan. Namun di lain sisi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan alokasi anggaran APBD yang terbatas memaksa untuk dilakukan penundaan sejenak pelaksanaan kegiatan program lain yang mendukung pencapaian program prioritas, padahal ketersediaan anggaran diperlukan secara signifikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dalam RPJMD 2017-2022 dan menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 terhadap visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022, khususnya dalam bidang pengawasan maka perlu didukung dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama satu tahun dalam kurun waktu 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Renstra Inspektorat yang disesuaikan dengan Rencana Kerja K/L terkait dan dipadukan dengan Rencana Kerja kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS hingga sampai dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2018.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam membantu tugas Gubernur di bidang pengawasan, sebagaimana Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang tidak secara signifikan termasuk dalam lingkup Perangkat Daerah untuk program pembangunan prioritas riil, namun tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakannya akan dapat menciptakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* pada Perangkat Daerah melalui peningkatan pelayan publik yang semakin berkualitas, bersih, responsif dan profesional. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Inspektorat yaitu Dokumen Rencana Strategis Inspektorat 2017-2022 sebagai Perencanaan Kerja Jangka Menengah lima tahunan dan Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Inspektorat Tahun 2018 yang terukur sebagai dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

- n. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud dukungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyusunan program kegiatan berbasis kinerja .
- b. Secara umum mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan mengacu pada program yang akan dilaksanakan perangkat daerah (*money follow program*), bukan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah (*money follow function*) guna mencapai target program/kegiatan yang sudah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

- a. Mengakomodir strategi perencanaan pembangunan untuk pendanaan program prioritas pembangunan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan tidak mengabaikan program/kegiatan prioritas maupun program nasional yang diamanatkan pemerintah pada Inspektorat daerah.
- b. Menyelaraskan dan mensinergikan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan program unggulan pembangunan prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022 sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih Tahun 2017 – 2022 yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah pada RKPD 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2018 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penguatan APIP, maka dilakukan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (Tahun 2016) dan hasil capaian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan II Tahun Anggaran 2017 yang telah direalisasikan melalui penetapan program/kegiatan di dalamnya yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan mengakomodir program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2012-2017.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016) dan Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2016 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan:

- • » 7 (tujuh) program dengan 41 (empat puluh satu) kegiatan
 - √ Terdiri dari 3 (tiga) program rutin dengan 22 (dua puluh dua) Kegiatan, dan
 - √ 4 (empat) program pembangunan strategis dengan 19 (sembilan belas) kegiatan sesuai kewenangan Inspektorat.

Namun demikian pada pertengahan Tahun anggaran 2016 terjadi defisit anggaran pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mengakibatkan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kemudian disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah dan dilakukan rasionalisasi anggaran dalam Perubahan Rencana Kerja guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan program pembangunan prioritas daerah

serta perubahan kebijakan pembangunan daerah, dan setelah dilakukan rasionalisasi dalam DPPA Tahun Anggaran 2016, terjadi pengurangan kegiatan dari program yang ada, yaitu:

- • » 7 (tujuh) program dengan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan
 - √ Terdapat tambahan satu kegiatan pada program rutin menjadi 23 (dua puluh tiga) Kegiatan, dan
 - √ Pengurangan lima kegiatan pada program pembangunan Strategis, sehingga tersisa 14 (empat belas) kegiatan sesuai kewenangan Inspektorat. dengan *tambahan dua kegiatan dan rasionalisasi enam kegiatan*

Realisasi dan capaian program/kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, dapat dilihat pada lampiran 1 Laporan Realisasi Belanja SKPD Tahun 2016 dan pada Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 (yang merupakan tahun berjalan).

Tabel 2.1.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 (s.d. Triwulan II)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2017
4 05	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN									
4 05 01	INSPEKTORAT DAERAH									
4 05 01 01	INSPEKTORAT DAERAH									
4 05 4 05 1 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah									

4	05	4	05	1	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Rp.1.890.490.000,00	Rp.8.066.097.857,00	Rp1.970.930.000,00	Rp.7.727.542.213,00	82,45	Rp.1.890.490.000,00	Rp.412.242.632,00	83,40
4	05	4	05	1	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	Rp.784.750.000,00	Rp.587.624.150,00	Rp.451.700.000,00	Rp.431.027.000,00	95,42	Rp.784.750.000,00	Rp.134.975.000,00	83,63
4	05	4	05	1	01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	-	Rp.72.000.000,00	Rp.66.175.000,00	Rp.65.100.000,00	98,38	-	Rp.27.343.930,00	99,40
4	05	4	05	1	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	Rp.618.724.850,00	Rp.559.801.500,00	Rp.1.195.724.000,00	Rp.49.229.900,00	98,46	Rp.618.724.850,00	Rp.3.250.000,00	84,50

4	05	4	05	1	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen terhadap perencanaa n tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensi nya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	Rp.55.050.00 0,00	Rp.92.043.00 0,00	-	-	-	Rp.55.050. 000,00	0,00	
4	05	4	05	1	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	Rp.42.825.00 0,00	Rp.16.300.00 0,00	-	-	-	Rp.42.825.0 00	Rp.2.700. 000,00	84,50
4	05	4	05	1	02		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur									

4	05	4	05	1	02	08	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Rp.329.600.000,00	Rp.155.007.064,00	Rp.345.895.000,00	Rp.309.774.252,00	89,56	Rp.329.600.000,00	Rp.37.275.000,00	80,14
4	05	4	05	1	02	09	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK		Rp.119.220.000,00	Rp.161.800.000,00	-	0,00			
4	05	4	05	1	03		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah									
4	05	4	05	1	03	01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	Rp.632.672.750,00	Rp.482.321.000,00	Rp.529.082.000,00	Rp.483.109.200,00	91,31	Rp.632.672.750,00	Rp.150.000.000,00	81,42
4	05	4	05	1	03	02	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	Rp.2.523.584.600,00	Rp.2.356.734.500,00	Rp.2.640.939.400,00	Rp.2.485.733.752,00	94,12	Rp.2.523.584.600,00	Rp.819.027.700,00	88,68

4	05	4	05	1	03	03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	Rp.299.224.00,00	Rp.199.734.669,00	Rp.175.652.00,00	Rp.168.359.610,00	95,85	Rp.299.224.000,00	0,00	80,23
							Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	Rp.142.118.00,00	Rp.270.051.500,00	-	-	0,00	Rp.142.118.000,00	-	0,00
4	05	4	05	1	03	04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	Rp.550.000.00,00	Rp.984.356.398,00	Rp.978.050.00,00	Rp.821.392.198,00	83,98	Rp.550.000.000,00	Rp.145.703.100,00	80,05

4	05	4	05	1	03	05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	Rp.350.000.000,00	-	-	-	-	Rp.350.000.000,00	0	0,00
4	05	4	05	1	03	06	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	Rp.149.820.000,00	Rp.155.007.064,00	Rp.150.080.000,00	Rp.143.433.775,00	95,57	Rp.149.820.000,00	Rp.18.691.564,00	80,10
4	05	4	05	1	03	07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	Rp.285.040.000,00	Rp.2.356.734.500,00	Rp.272.630.000,00	Rp.95.540.000,00	80,44	Rp.285.040.000,00	Rp.47.250.000,00	85,37
4	05	4	05	1	04		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomidan Budaya									
4	05	4	05	1	04	05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	-	-	-	-	-	-	-	-

4	05	4	05	1	04	06	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----	---	----	---	----	----	------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator program dan kegiatan tahun 2015 dan 2016 telah diselaraskan dengan indikator program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra tahun 2017-2022. Selain itu tahun 2016, semua program mencapai realisasi anggaran rata-rata di atas 80% hingga 99% dengan dua program/dua kegiatan yang mencapai target sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian realisasi 100%. Namun demikian terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasinya masih jauh di bawah target, yaitu di bawah 50% dan 3 (tiga) kegiatan hanya mencapai di bawah 60% (lihat tabel Realisasi Anggaran Tahun 2016).

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas rata-rata adalah adanya komitmen yang kuat dari semua elemen Perangkat Daerah memedomani Renstra, Renja, Tapkin dan IKU yang sudah ditetapkan, sehingga target dapat tercapai dengan baik. Sedangkan untuk kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan di bawahnya tidak mencapai target dikarenakan tidak adanya pengaduan yang masuk dari kabupaten/kota pada tahun 2015, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan revidu dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam Indikator kinerja Kunci Rencana Strategis 2012-2017 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terkait dengan kinerja pelayanan disajikan dalam Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	2016 & 2017											
1	Indeks Reformasi Birokrasi			55,00	65,00			63,16				
2	Prosentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (A) atau (B)			65,00%	75,00%			42,86				

3	Prosentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.			97,00%	98,00%			91,63%				
4	Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti.			96,00%	97,00%			84,04%				
5	Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat			100%	100%			100%				

6	Jumlah peningkatan sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD/Pengadaan Barang dan Jasa:											
	a. Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD			8 orang	8 orang			14 orang				
	b. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa			6 orang	7 orang			1 orang				
	2018 & 2019											
8	Persentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja Baik					75,00	75,00			75,00	75,00	
9	Tingkat capaian Level Maturitas SPIP					2	2			2	3	
10	Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP					3	3			3	3	

11	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti				90,00	90,00			90,00	90,00	
12	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah				93	94			93	94	
13	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat				100	100			100	100	

2.1 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pada Tahun 2016, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan langkah-langkah strategis dan persiapan penilaian untuk peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 dan peningkatan kematangan maturitas SPIP, yang juga merupakan program strategis nasional dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan..

Selain itu kegiatan tahunan yang secara rutin dilakukan adalah melaksanakan rapat/forum koordinasi bersama Inspektur kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membahas kerjasama program kerja serta menyamakan persepsi terkait pengawasan di lingkungan Kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga ikut serta pada rakorwasdanas dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam hal penetapan kebijakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat dalam penguatan peran kelembagaan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2016 adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan, kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi serta sarana/prasarana yang belum memadai, sehingga Inspektorat harus berupaya keras untuk meningkatkan APIP sebagai *consulting* dan *quality assurance* dalam memberikan keyakinan yang memadai dan peran konsultasi. Selain itu juga masih kurang proaktifnya SKPD selaku obyek pemeriksaan dalam melakukan koordinasi kepada Inspektorat, yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang seharusnya bisa dideteksi sejak dini, dan segera dapat dilakukan pembinaan, namun pada kenyataannya setelah masuk ke pihak pengawas eksternal barulah SKPD melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk dimintakan pendapat, saran dan solusinya, meski sudah sulit dan kompleks untuk ditangani karena telah berurusan dengan pihak luar dan bersentuhan dengan hukum.

Hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Inspektorat yang

akhirnya akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Gubernur selaku Kepala Daerah. Oleh karena itu, secara kelembagaan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki tugas yang berat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sekaligus melakukan pendekatan persuasif kepada SKPD agar mau bersama-sama meningkatkan kinerja dan transparansi serta memaksimalkan pelayanan publik. Inspektorat juga membuka pengaduan kasus baik secara *offline* maupun *online* mulai dari lingkup pegawai provinsi maupun masyarakat secara keseluruhan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/pemeriksaan khusus terhadap aduan kasus yang terjadi. Beberapa hal penting menjadi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti guna perumusan program dan kegiatan prioritas tahun berjalan dan selanjutnya.

2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2016, anggaran belanja langsung Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD 2016 ditetapkan sebesar Rp. 10.253.391.000,00 (dengan 6 program 41 kegiatan), namun setelah dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap belanja langsung pada anggaran perubahan anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 1.314.733.600,00 maka anggaran belanja langsung keseluruhan sebesar Rp. 8.938.657.400,00 (7 program dan 37 kegiatan untuk ditetapkan dalam RKPD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 (daftar rasionalisasi anggaran belanja langsung tahun 2016 terlampir pada lampiran 2).

Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 berdasarkan Rancangan RKPD awal Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKPD 2017 ditetapkan sebesar Rp. 8.653.899.200,00 (terdapat 6 program 34 kegiatan) dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp. 2.712.828.019,00 dengan prosentase sebesar 31,35%. Namun kemudian dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap belanja langsung pada anggaran perubahan anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 857.544.750,00 sehingga anggaran belanja langsung keseluruhan Tahun 2017

dalam RKPD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.796.354.450,00 dengan jumlah program dan kegiatan tetap. Kegiatan yang diusulkan hanya mengalami rasionalisasi dan pergeseran nominal dan merupakan prioritas daerah yang mendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dari hasil analisis di atas, dapat dikemukakan bahwa dari Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dalam RKPD Tahun 2017 terdapat penurunan kegiatan dan jumlah nominal anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15,60% dari tahun sebelumnya.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dan disajikan dalam Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	1,665,074,030	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	1,665,074,030	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	596,060,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	596,060,000	

3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	85 Orang	123,800,000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkalpinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	85 Orang	123,800,000	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	443,789,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	443,789,000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pangkalpinang	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	22,250,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pangkalpinang	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	22,250,000	

6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	50,775,000	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	50,775,000	
7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 Laporan	206,000,000	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 laporan	206,000,000	
8	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Pangkalpinang	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Lakip/ LPPD PD Prov dan Kab/Kota	0	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Pangkalpinang	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Lakip/ LPPD PD Prov dan Kab/Kota	0	

9	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah laporan RAD PPK	4 laporan	77,650,000	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah laporan RAD PPK	4 laporan	77,650,000		
10	Penilaian Internal Zona Integritas	Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja ZI	1 unit kerja	0	Penilaian Internal Zona Integritas	Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja ZI	1 unit kerja	0		
11	Monev Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	0	Monev Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	0		
12	Penanganan whistle Blower System	Pangkalpinang	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	0	Penanganan whistle Blower System	Pangkalpinang	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	0		
13	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pangkalpinang	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	seluruh PD Pemprov	250,000,000	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pangkalpinang	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	seluruh PD Pemprov	250,000,000		
14	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	-	-	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	-	-		

15	Sosialisasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah sosialisasi SPIP	4 kali sosialisasi dalam setahun	0	Sosialisasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah sosialisasi SPIP	4 kali sosialisasi dalam setahun	0	
16	Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah Money SPIP	4 kali	0	Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Pangkalpinang	Jumlah Money SPIP	4 kali	0	
17	Konsultasi Audit	Pangkalpinang	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pemprov	150,000,000	Konsultasi Audit	Pangkalpinang	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pemprov	150,000,000	
18	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pangkalpinang	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	140 Obrik	2,800,000,000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pangkalpinang	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	140 Obrik	2,800,000,000	
19	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	140 Obrik	0	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas Pengawasan APIP dan BPK	140 Obrik	0	

20	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	140 Obrik	447,444,000	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	140 Obrik	447,444,000	
21	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Pangkalpinang	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	162,320,000	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Pangkalpinang	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	162,320,000	
22	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pangkalpinang	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 rakor 1 PKPT	156,174,000	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pangkalpinang	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 rakor 1 PKPT	156,174,000	

23	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Pangkalpinang	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	10%	383,750,000	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Pangkalpinang	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	10%	383,750,000	
24	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Pangkalpinang	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	10 laporan pengaduan	100,000,000	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Pangkalpinang	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	10 laporan pengaduan	100,000,000	
25	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	200,000,000	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Pangkalpinang	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	200,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, telah diamanatkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Dalam RPJMN 2015-2019 tahapan pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara yang mampu mendukung pembangunan nasional. Salah satu agenda pokok adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta efektif dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif, yang sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019 dan sejalan dengan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terkait dengan sasaran target kinerja Inspektorat sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 3.2.1

**Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra inspektorat 2017-2022**

No.	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai Komponen Proses Indeks Reformasi Birokrasi (8 area perubahan)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal baik	60	60	75	80	80
			Meningkatny kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Nilai capaian komponen akuntabilitas SPIP	2 s .d.	2 s .d.	3 s .d.	3 s .d.	3 s .d.
					2.99	2.99	3.99	3.99	3.99
2.	Meningkatkan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Penguatan Pengawas an pada komponen proses IRB	Menurunnya jumlah temuan bersifat materiil pada OPD	Persentase OPD yang tidak memiliki temuan materiil	10	9	9	8	8

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mendukung tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilakukan pencapaian strategi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Melakukan pembinaan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ruang lingkup pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan, pengelolaan barang milik daerah/aset, revidu terhadap Laporan Keuangan SKPD, serta pemeriksaan lainnya dalam rangka pembinaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan pendekatan dan penyelesaian secara persuasif terhadap temuan hasil pengawasan yang berindikasikan merugikan negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah;
4. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Adanya penyelesaian secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi temuan pengawasan;
6. Memberikan kesempatan kepada aparatur pengawas dan auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Untuk mencapai strategi di atas, ditetapkan kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan program nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat dengan

diprioritaskan pada upaya peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 2) Peningkatan pelayanan publik yang berdasarkan *good governance* dan *clean government* diprioritaskan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;
- 4) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.

Strategi dan kebijakan yang diambil berpedoman pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif atas strategi dan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Sasaran 1.1

: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :*

- a) Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Penyusunan laporan Tim Aksi PPK daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Sasaran 1.2:

Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial*

Ekonomi dan Budaya, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Konsultasi Audit.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran 2.1:

Menurunnya jumlah temuan bersifat materiil pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

❖ *Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :*

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
- c) Peningkatan sistem aplikasi pengawasan;
- d) Pelaksanaan koordinasi pengawasan daerah;
- e) Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah;
- f) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda;
- g) Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan rencana program dan kegiatan yang merupakan rutin operasional kantor/organisasi adalah sebagai berikut, yaitu:

Tujuan umum : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

Sasaran Umum : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

❖ *Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan , dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:*

- a) Pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan disiplin aparatur;
- d) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;

f) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan di atas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Secara singkat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2019 Rencana Tahun 2019	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	05						FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN								
4	05	01					INSPEKTORAT DAERAH								
4	05	01	01				INSPEKTORAT DAERAH								
4	05	4	05	1	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah								
4	05	4	05	1	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Pangkalpinang	100%	1,665,074,030	APBD		100%	1,952,000,000

4		4	05	1	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	Pangkalpinang	100%	596,060,000	APBD		100%	7,582,000,000
4	05	4	05	1	01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	Pangkalpinang	85 Orang	123,800,000	APBD		95 Orang	90,720,000
4	05	4	05	1	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	Pangkalpinang	100%	443,789,000	APBD		100%	656,000,000
4	05	4	05	1	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	Pangkalpinang	4 Dokumen	22,250,000	APBD		4 Dokumen	31,000,000

4	05	4	05	1	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	Pangkalpinang	7 Laporan	50,775,000	APBD	7 Laporan	80,000,000
4	05	4	05	1	02		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur							
4	05	4	05	1	02	08	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Pangkalpinang	4 laporan	206,000,000	APBD	4 laporan	346,000,000
4	05	4	05	1	02	09	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK	Pangkalpinang	4 laporan	77,650,000	APBD	4 laporan	125,000,000
4	05	4	05	1	03		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah							
4	05	4	05	1	03	01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	Pangkalpinang	10%	383,750000	APBD	15%	582,000,000

4	05	4	05	1	03	02	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	Pangkalpinang	-	2,800,000,000	APBD	150 Obrik	2,940,000,000
4	05	4	05	1	03	03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	Pangkalpinang	2 rakor 1 PKPT	156,174,000	APBD	2 rakor 1 PKPT	314,000,000
4	05	4	05	1	03	04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	Pangkalpinang	140 Obrik	447,444,000	APBD	150 Obrik	767,000,000
4	05	4	05	1	03	05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	Pangkalpinang	2 laporan	200,000,000	APBD	2 laporan	397,000,000

4	05	4	05	1	03	06	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	Pangkalpinang	100%	162,320,000	APBD	100%	170,436,000
4	05	4	05	1	03	07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	Pangkalpinang	10 laporan pengaduan	100,000,000	APBD	15 laporan pengaduan	257,250,000
4	05	4	05	1	04		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomidan Budaya							
4	05	4	05	1	04	05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah PD yang terlayani dalam Sisatgas SPIP	Pangkalpinang	seluruh PD Pemprov	250,000,000	APBD	42 PD	262,500,000
4	05	4	05	1	04	06	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	Pangkalpinang	seluruh PD Pemprov	150,000,000	APBD	seluruh PD Pemprov	160,000,000

